



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KECAMATAN BONTANG BARAT
KOTA BONTANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

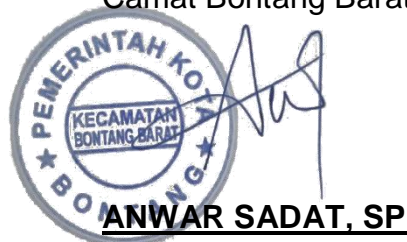
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja pada instansi. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem LKjLP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja Kecamatan Bontang Barat dan capaian kinerja Kecamatan Bontang Barat yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 - 2021.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Barat.

Bontang, 24 Februari 2022

Camat Bontang Barat,



ANWAR SADAT, SP

NIP 197402192001121004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Aparatur	7
D. Aspek Strategis Organisasi	9
E. Aset Perangkat Daerah	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	12
B. Indikator Kinerja Utama	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
D. Strategi	16
E. Kebijakan	17
F. Program dan Kegiatan	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Status dan Jumlah Pegawai	8
Tabel 2	:	Aset Kecamatan Bontang Barat	11
Tabel 3	:	Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 4	:	Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
Tabel 5	:	Target Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 6	:	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
Tabel 7	:	Sasaran, Indikator Kinerja, dan Strategi	17
Tabel 8	:	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Sasaran	19
Tabel 9	:	Sasaran Strategis, Indikator, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	20
Tabel 10	:	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	22
Tabel 11	:	Tindak lanjut Evaluasi Sakip Tahun 2021	23
Tabel 12	:	Capaian Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 13	:	Pengukuran Kinerja Organisasi Per Triwulan	25
Tabel 14	:	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019	26
Tabel 15	:	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini (akumulasi)dengan Target Jangka Menengah Organisasi (Target Akhir Renstra)	26
Tabel 16	:	Evisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 17	:	Evisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	30
Tabel 18	:	Pencapaian Target Kinerja Sesuai dengan Pernyataan Kinerja Berdasarkan Program dan Kegiatan	32
Tabel 19	:	Realisasi Anggaran Tahun 2021	40
Tabel 20	:	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan	41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	:	Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021	8
Grafik 2	:	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang merupakan unsur Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Bontang. Kecamatan Bontang Barat adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penunjang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Bontang Barat adalah instansi eselon III, dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, adapun Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016, Kecamatan Bontang Barat mempunyai Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1) CAMAT

Camat Mempunyai Tugas :

- A. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Umum
- B. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- C. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- D. Mengkoordinasikan penerapan dan penegasan peraturan perundang-undangan dan peraturan Kepala Daerah;
- E. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- F. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- G. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan;

- H. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan;
- I. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
- J. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undang.

2) SEKRETARIS KECAMATAN

- A. Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi ;
Perencanaan Program kerja bidang kesekretariatan dan keuangan;
- B. Penyiapan bahan petunjuk teknis Kesekretariatan dan keuangan;
- C. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, Kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
- D. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan internal kantor;
- E. Pelaksanakan Kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian seluruh internal kantor;
- F. Pelaksanakan kordinasi dalam penghimpun data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- G. Pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas seksi;
- H. Penyelenggaran pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
- I. Memfasilitasi dan pengkoordinasikan kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait;
- J. Pengusulan program Pendidikan dan pelatihan aparatur internal kantor;
- K. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kesekretariatan dan keuangan;
- L. Pelaporan dan konsultasi dilaksanakan tugas kepada atasan;
- M. Pelaksanakan Konsultasi dan Korrdinasi secara horizontal, vertical dan diagonal sesuai dengan kewenangan;
- N. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;
- O. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan.

3) SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kecamatan di bidang Pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan.
- B. Mengolah data informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan;
- C. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan;
- D. Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan Instansi terkait;
- E. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada pemerintah Kelurahan;
- F. Melaksanakan tugas bidang administrasi kependudukan dan pemecahan permasalahan di lingkup tugasnya;
- G. Melaksanakan tugas administrasi pertanahan dan pemecahan dan permasalahan di lingkup tugasnya;
- H. Melakukan monitoring dan evaluasi pembayaran PBB;
- I. Menyiakan bahan kegiatan pemilu dengan instansi terkait;
- J. Melakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah;
- K. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- L. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
- M. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4) SEKSI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugasnya;
- B. Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- C. Melakukan hubungan kerja dan mengadakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

- D. Memfasilitasi dalam pemecahan dan penanggulangan bencana
- E. Melaksanakan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban termasuk terhadap THM, Panti Pijat, Pub Karaoke serta tempat hiburan lainnya di wilayah Kecamatan.
- F. Memfasilitasi dalam pengkoordinasian kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan Instansi terkait.
- G. Melaksanakan pengawasan dan Tindakan pembinaan (non yutisi) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- H. Melakukan pemantauan kegiatan yang diadakan organisasi politik dan organisasi Kemasyarakatan.
- I. Melakukan pengamanan Bersama dengan instansi terkait terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, Kecelakaan, Kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat di wilayah Kecamatan.
- J. Melakukan Komunikasi, Konsultasi dan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya di bidang keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum.
- K. Memberikan pelayanan rekomendasi SKCK dan izin Keramaian.
- L. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- M. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5) SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam Menjalankan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- A. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang ekonomi dan pembangunan.
- B. Merencanakan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan.
- C. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- D. Melakukan evaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

6) SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam Menjalankan tugas tersebut. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Mempunyai Fungsi :

- A. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja.
- B. Merencanakan program kerja dan anggaran seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial.
- C. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait.
- D. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap Lembaga/badan sosial dan Keagamaan di wilayah kecamatan.
- E. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan peningkata Kehidupan beragama di kecamatan.
- F. Menyiapkan bahan pembinaan Kesehatan dan lingkungan.
- G. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- H. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7) SEKSI SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM

- A. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas kecamatan di bidang Pelayanan Umum. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi sarana dan prasarana pelayanan umum.
- B. Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- C. Memfasilitasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum :
 - Drainase
 - Permukiman Masyarakat
 - Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
 - Jalan dan Jembatan
 - Sarana Kesehatan Masyarakat
 - Sarana Pendidikan
 - Penerangan Jalan Umum

- Pasar
 - Pelabuhan
 - Kuburan
 - Objek Wisata
 - Sarana Olahraga
 - Taman Bacaan
 - Fasilitas Umum Lainnya
- D. Melakukan monitoring terhadap pembangunan fasilitas pelayanan umum diwilayah.
- E. Melakukan pembinaan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah.
- F. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada atasan.
- G. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8) KASSUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- A. Kasub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki Uraian Tugas Sebagai Berikut :
- Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- B. Mengkoordinir dalam menyiapkan bahan teknis perencanaan program dan keuangan.
- C. Mengkoordinir dalam menyiapkan administrasi keuangan
- D. Melakukan Verifikasi keuangan secara berkala
- E. Melaksanakan evaluasi dan monitoring dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan.
- F. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horizontal,vertical dan diagonal sesuai dengan kewenangannya.
- G. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan.
- H. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.
- I. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

9) KASSUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum Mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

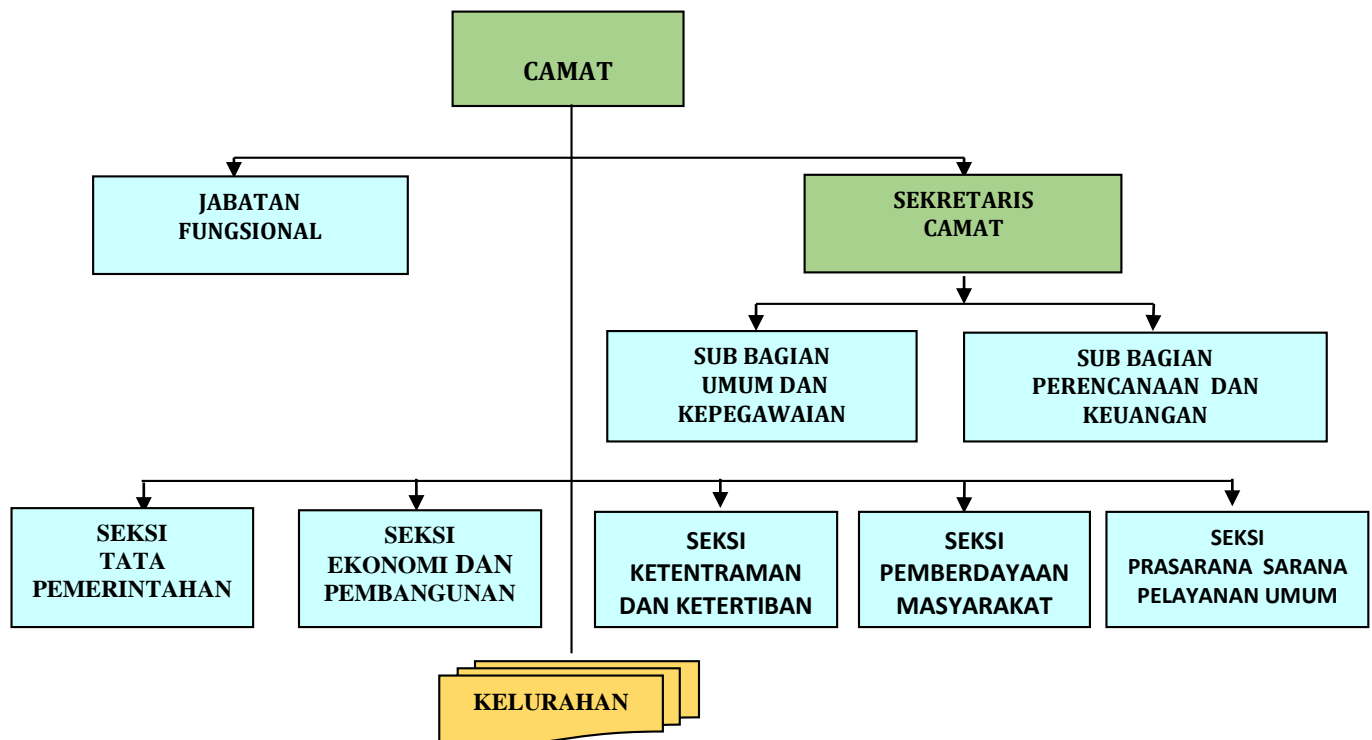
- A. Merencanakan kegiatan sub bagian umum.

- B. Menyiapkan bahan petunjuk teknis administrasi umum
- C. Mengumpulkan, Menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku.
- D. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga.
- E. Menyusun data dan laporan kepegawaian.
- F. Mengajukan usulan untuk penghpausan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- G. Mengatur urusan kehumasan dan monitoring sub bagian umum.
- H. Melaksanakan evaluasi dan monitoring sub bagian umum.
- I. Membuat laporan dan Konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan.

Kecamatan Bontang Barat Membawahi 3 Kelurahan ,Adapun Nama-nama Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Kanaan
- b. Kelurahan Belimbing
- c. Kelurahan Gunung Telihan

Struktur Organisasi Kecamatan :



C. SUMBER DAYA APARATUR

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu saerah akan dibawa. Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan karena aparatur

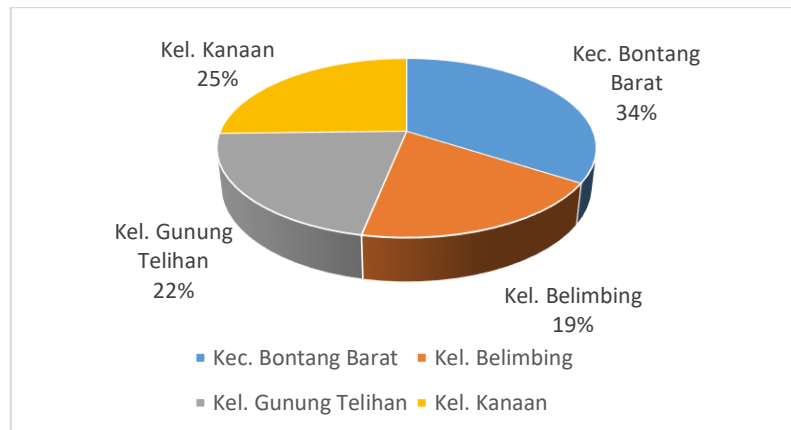
pemerintah merupakan subyek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Sebaik apapun suatu system tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang professional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menguatkan peran Kecamatan Bontang Barat sebagai Simpul Pelayanan Pemerintah Kota Bontang Dengan kaitan tersebut, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk dilaksanakan pada saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dalam Rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Bontang Barat mempunyai personil sebanyak 129 orang pegawai terdiri dari 65 orang dengan status pegawai negeri sipil (PNS), dan 56 orang dengan status Non PNS.

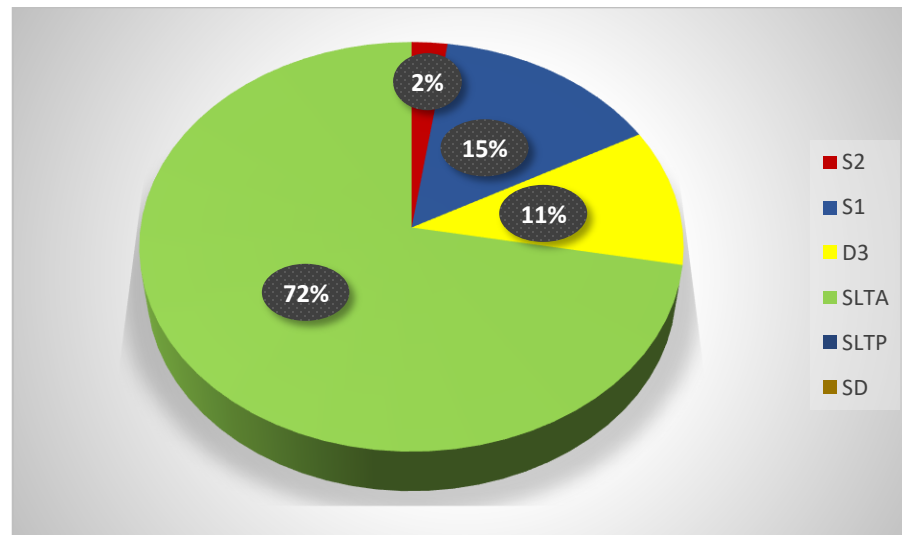
Tabel 1 Status dan Jumlah Pegawai

PNS (Golongan)				NON PNS	Tingkat Pendidikan						Jenis Kelamin	
IV	III	II	I		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Lk	Pr
1	43	21	0	56	3	19	14	93	0	0	62	67
65				56	129						129	

Grafik 1 Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat 2021



Grafik.2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan analisis beban kerja, secara kuantitas sumber daya aparatur telah mencukupi kebutuhan namun dari segi kualitas diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pegawai yang ada di Kecamatan Bontang barat.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Kecamatan Bontang Barat adalah masih belum proposionalnya jumlah aparatur sesuai dengan Analisa jabatan dan beban kerja serta belum tersedianya tenaga Verifikator yang bertanggungjawab secara langsung. Namun Camat Bontang Barat mengingat saat ini kelurahan telah menjadi Perangkat Daerah.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka percepatan pembangunan disegala bidang maka dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah karena pemahaman yang mendalam terhadap keadaan wilayah akan membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota memahami sepenuhnya bahwa Kota Bontang memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri dibanding daerah lain baik yang berada di wilayah Propinsi Kalimantan Timur maupun wilayah lainnya di seluruh Indonesia, karena itu diperlukan pendekatan pemerintah, pembangunan sosial kemasyarakatan yang khas pula. Secara relatif Kota Bontang adalah kota kawasan industri yang mengalami pertumbuhan signifikan dan telah menjadi kota industri utama di Indonesia, khususnya kawasan timur Indonesia. Keberadaan beberapa industri strategis berbasis gas alam telah menjadikan Kota Bontang sebagai kota industri yang terus mengembangkan diri menjadi kota industri gas

minyak bumi dan kondensat terutama di Indonesia, hal ini telah pula dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Posisi perkembangan di atas, disadari atau tidak akan bermuara pada kemampuan daerah untuk menyediakan sumber daya manusia teknis produktif yang high quality, agar mampu mengelola dan meningkatkan pemberdayaan seluruh potensi wilayah yang mendukung pembangunan yang tengah berjalan. Sehingga satu sisi pembangunan dapat berjalan dengan baik sementara disisi lain dapat disiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi aset daerah dalam kerangka pemberdayaan potensi wilayah dimaksud.

E. ASET PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bontang Barat dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian besar sarana dan prasarana dalam kondisi baik namun demikian tentunya masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, namun hal tersebut diharapkan tidak mengurangi upaya maksimal dalam mendukung tercapainya visi Kota Bontang yaitu “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.”

Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai berikut :

Tabel 2. Aset Kecamatan Bontang Barat

No	Jenis Aset	Jumlah Nilai (Rp)
1	Tanah	3,914,761,000.00
2	Mesin dan Peralatan	4,127,671,858.00
3	Gedung dan Bangunan	20,033,029,794.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,018,199,462.00
5	Aset Tetap Lainnya	89,376,000.00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	817,172,735.00
7	Software/Aset Lainnya	14,022,038.00
8	Aset Lainnya	25,631,525.00
Jumlah Total Aset		30,039,864,412.00

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara bertahap yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama waktu tertentu yang sudah ditetapkan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai hasil perencanaan strategis yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan yang ingin dicapai serta Program dan Kegiatan yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.

1. VISI

Visi Kota Bontang adalah ***“Menguatkan Bontang sbagai Kota Maritim berkebudayaan industry yang bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”***

MISI

Misi tersebut dijabarkan dalam tiga Misi sebagai penunjuk jalan yang akan mengarahkan langkah untuk mencapai visi tersebut yaitu :

- a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2. TUJUAN

Dalam mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Walikota Bontang, Kecamatan Bontang Barat telah menentukan tujuan yang sejalan dengan fungsi kecamatan sebagai pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

3. SASARAN

Adapaun sasaran yang hendak dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Tabel 3 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
2	Meningkatkan pemberdayaan sosial dan ekonomi di wilayah Kecamatan Bontang Barat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 telah melakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 – 2021 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontang Barat sebagai berikut :



Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diadakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Camat Bontang Barat	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat perencanaan dalam pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah peserta Musrenbang}}{\text{Jumlah undangan Musrenbang}} \times 100\%$	Camat Bontang Barat	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Musrenbang Kecamatan Bontang Barat- Laporan Musrenbang tingkat Kelurahan

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bontang Barat telah menetapkan target-target capaian kinerja tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 5 Target Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai SKM	76	76	78	80	82	84	84
2.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat Bontang Barat akan mewujudkan target kinerja tahun 2021 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan anggaran, sebagaimana tersebut dalam ***lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2021.***

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tertanggal, 1 Januari 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tertanggal, April 2021.

Tabel 6 Perjanjian Kinerja tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM	84	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	

D. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal OPD.
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Strategi Kantor Kecamatan Bontang Barat dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, yakni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7 Sasaran, Indikator Kinerja, dan Strategi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM	Menyusun alur pelayanan, menyediakan kotak saran/pengaduan dan membuat leaflet atau brosur pelayanan
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Memberikan undangan dan pengumuman pelaksanaan kegiatan sampai tingkat kelurahan dengan baik

E. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Program dan kegiatan di Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 yang mendukung tercapainya sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ada 5 (Lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.744.663.458,00- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.461.364.282,00,- (92,34%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.264.701.372,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.161.060.643,00 (93,85%)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.443.913.233,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.333.988.422,00(98,61%).
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 846.606.766,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 783.408.846,00 (90,85%)
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 152.771.199,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.241.199,00,-(95,88%)

Secara singkat dapat ditampilkan tabel tujuan, sasaran dan target Renstra selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :



Tabel 8 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	76	78	80	83	84
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 9 Sasaran Strategis, Indikato kinerja, Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Nilai SKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Bontang Barat)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Bontang Barat)
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Bontang Barat)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Bontang Barat)
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Bontang Barat)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bontang Barat)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Bontang Barat)
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bontang Barat)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Bontang Barat)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Bontang Barat)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Meubel
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Bontang Barat)	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Bontang Barat)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Bontang Barat)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Bontang Barat)	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kanaan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Belimbing) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kanaan) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Belimbing) Evaluasi Kelurahan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanaan) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Belimbing)
	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Bontang Barat)
	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanaan) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunung Telihan) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Belimbing)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gn. Telihan) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gn. Telihan) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gn. Telihan)
	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Belimbing)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja pemerintah adalah perwujudan kebijakan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2020

Pada tahun 2020, hasil evaluasi kinerja Kecamatan Bontang Barat yang tertuang dalam surat Inspektur Kota Bontang Tanggal 14 Juli 2021, Nomor : 700/067/ITDA.02, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020. Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020 mendapatkan nilai sebesar **54,18** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP dilingkungan Kecamatan Bontang Barat. Terhadap evaluasi SAKIP tersebut, Kecamatan Bontang Barat direkomendasikan untuk melakukan penyempurnaan yakni:

Tabel 10 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30 %	19,48	21,30
2	Pengukuran Kinerja	25 %	16,25	12,50
3	Pelaporan Kinerja	15 %	9,80	12,04
4	Evaluasi Kinerja	10 %	3,71	4,59
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20 %	8,75	13,75
Nilai hasil evaluasi		100	57,99	64,18

Terhadap permasalahan yang dikemukakan, serta mempelajari hasil dokumen SAKIP Kecamatan Bontang Barat, terhadap Evaluasi SAKIP Tahun

Anggaran 2020, bahwa Kecamatan Bontang Barat agar menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat antara lain :

Tabel 11 tidak lanjut evaluasi sakip TA. 2020

Rekomendasi		Tindaklanjut	Rencana Aksi
1		2	3
Perencanaan Kinerja			
1	Menyusun Indikator Tujuan berorientasi hasil dan terukur dan disertai target keberhasilan	Menetapkan indicator dan target keberhasilan atas tujuan yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan rapat bagi Pejabat Struktural untuk membahas indicator keberhasilan tujuan dan target yang ingin dicapai Evaluasi terhadap format penyusunan Renstra 2016-2021
2	Mencantumkan target secara periodic atas kinerja pada Tabel Rencana Aksi	Menetapkan target secara periodek dalam Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan rapat bagi Pejabat Struktural untuk membahas target Rencana Aksi Evaluasi terhadap format penyusunan Rencana Aksi
3	Menyusun Laporan Monitoring Rencana Aksi secara berkala	Menyusun laporan monitoring Rencana Aksi secara berkala	Mengintruksikan kepada Pejabat Struktural untuk membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi
4	Menyusun tindak lanjut atas hasil monitoring rencana aksi	Menyusun tindak lanjut atas hasil monitoring rencana aksi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan rapat bagi Pejabat Struktural untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi Menyusun langkah-langkah antisipatif jika terdapat kendala dalam pelaksanaan rencana aksi
Pengukuran Kinerja			
1	Menyusun Kertas Kerja Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Menyusun Kertas Kerja Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan rapat evaluasi per triwulan Menyusun laporan evaluasi rencana aksi
2	Menyusun Laporan Monitoring atas Target kinerja jabatan Administrator dan jabatan Pengawas	Menyusun Laporan Monitoring atas Target kinerja jabatan Administrator dan jabatan Pengawas	Mengintruksikan kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas agar menyapaikan laporan monitoring atas kinerja jabatan

3	Menyusun SK Camat atas hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat jabatan Pengawas keatas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	Menyusun SK Camat atas hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat jabatan Pengawas keatas	Menyusun SK Camat atas hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat jabatan Pengawas keatas
Evaluasi Internal			
1	Melampirkan undangan, daftar hadir, notulen rapat dan dokumentasi atas kegiatan rapat pembahasan Rencana Aksi	Memperbaiki administrasi kegiatan penyusunan rencana aksi	Memperbaiki administrasi kegiatan penyusunan rencana aksi
2	Menyusun Laporan Evaluasi Rencana Aksi yang berisi alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan setiap periode	Menyusun Laporan Evaluasi Rencana Aksi secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan rapat evaluasi per triwulan Menyusun laporan evaluasi rencana aksi
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi			
1	Dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah agar memaksimalkan pencapaian sasaran/kinerja outcome supaya target yang ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai secara optimal, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, dan informasi mengenai kinerja sepenuhnya dapat diandalkan	Memaksimalkan pencapaian sasaran/kinerja outcome supaya target yang ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai secara optimal, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, dan informasi mengenai kinerja sepenuhnya dapat diandalkan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi secara berkala atas sasaran/kinerja Melakukan pembinaan kinerja terhadap pegawai Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan kinerja kecamatan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja maka LKjIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi juga harus menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta penjelasan atas pencapaian kinerja tersebut

Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas.

Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Barat tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 12 Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	84	86,91	103,46
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100

Tabel 13 Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	84	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	84	86,91	103,46
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	Triwulan I	100	100	100.00
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 14 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	% Peningkatan / Penurunan tahun 2020
1.	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	83,87	84,56	86,91	2,78%
2.	Presentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100	0,00%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 15 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi) dengan target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d. 2021	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai	86,91	84	103,46
Presentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja digambarkan sebagai berikut :

a. Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Bontang Barat. Survey ini meliputi pelayanan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban

dan pelayanan dalam fasilitas pelayanan umum baik di Kecamatan maupun di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Bontang Barat.

Dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Bontang digunakan hasil survey yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat. Pada tahun 2021 target untuk nilai SKM ditetapkan dengan nilai 84. Dalam upaya pencapaian target tersebut, Kecamatan Bontang Barat dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 103,46% atau dengan nilai 86,91. Nilai SKM ini merupakan nilai rata-rata dari semua unit pelayanan di Kecamatan Bontang Barat. Demikian juga jika dibandingkan dengan pencapaian nilai SKM pada tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 2,78 persen dimana pada tahun 2021 mendapat nilai 86,91, setelah sebelumnya mendapat nilai 84,56 pada tahun 2020.

b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Dalam mengukur indikator ini digunakan indikator tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Pencapaian indikator tersebut dapat dianalisis sebagai berikut :

- Tingkat Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan tingkat pembangunan kecamatan. Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan, dengan target 150 org realisasinya 150 org, sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, realisasi capaian kinerja 100%, adapun program yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mencapai 100%

5. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan di Kecamatan Bontang Barat, hal tersebut mengidentifikasi bahwa kantor Kecamatan Bontang Barat

harus lebih pro aktif dalam melaksanakan aktifitasnya guna menangkap peluang yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Untuk itu pada saat penentuan strategi dan kunci keberhasilan harus lebih diarahkan pada strategi agresif tersebut.

Adapun faktor kunci keberhasilan yaitu :

1. Memberdayakan SDM Pegawai yang ada guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan.
2. Melaksanakan dengan penuh tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan guna mendukung kebijakan – kebijakan Pemerintah.
3. Mendayagunakan motivasi dan disiplin kerja guna terlaksananya tugas Pemerintah dengan baik.
4. Mendayagunakan SDM pegawai yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain guna mengatasi permasalahan sosialisasi yang terjadi di dalam masyarakat.
5. Mendayagunakan motivasi dan disiplin kerja untuk kerjasama dengan pihak lain.
6. Memantapkan penetapan pegawai dengan keahliannya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai tabel berikut :

Tabel 16 Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	103,46	92,71	10,75
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100	98,39	1,61

Dari table di atas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi sasaran strategis “meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat” pada tahun 2021 Kecamatan Bontang Barat mampu melakukan efisiensi anggaran dengan hanya menyerap anggaran sebesar 92,71% dan dapat melampaui target



indikator kualitas pelayanan masyarakat sebesar 103,46%. Adapun sasaran strategis “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan” Kecamatan Bontang Barat mampu melakukan efisiensi anggaran dengan hanya menyerap anggaran sebesar 98,39% dan dapat mencapai target indikator kinerja sebesar 100%

Pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena faktor penyusunan perencanaan yang baik dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan (PPTK) yang dapat menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.



Tabel 17 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	APBD	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan			Ket.
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.452.026.028	28.881.271.392	1.570.754.636	5,16%	30.452.026.028	5	16	46	Fisik : 100% Keu : 94,84%

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Penyusunan perencanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan harus dimaksimalkan sinkronisasinya antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang telah direncanakan, baik dalam dokumen rencana kerja maupun dokumen rencana kinerja, dan telah dialokasikan dalam anggaran tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaannya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis pencapaian target kinerja sesuai dengan Pernyataan Kinerja berdasarkan program dan kegiatan digambarkan dalam table berikut :



Tabel 18 pencapaian target kinerja sesuai dengan Pernyataan Kinerja berdasarkan program dan kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PROSENTASE REALISASI KINERJA	PK INDIVIDU
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	100	%	100	%	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya kebutuhan dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang	65	Orang	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya kebutuhan untuk laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya kebutuhan untuk laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Bontang Barat)	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas	1	Tahun	1	Tahun	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian



7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Bontang Barat)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang	20	Orang	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1	Tahun	1	Tahun	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 & 29	Jenis	35 & 29	Jenis	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	23 & 1710	Jenis	23 & 1710	Jenis	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10	Jenis	10	Jenis	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	61095	Eksemplar	61095	Eksemplar	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Bontang Barat)	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	1	Tahun	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas atau Lapangan	1	tahun	1	tahun	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
15	Pengadaan Meubel	Tersedianya meubelair kantor	1	Jenis	1	Jenis	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya kebutuhan air, listrik, telephon dan internet	12	Bulan	12	Bulan	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian



17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Bontang Barat)	Tersedianya jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21	orang	21	orang	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Bontang Barat)	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Perawatan	13	Unit	13	Unit	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Bontang Barat)	Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan	20	Unit	20	Unit	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)	Terpeliharanya gedung kantor	2	Gedung	2	Gedung	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Barat)	Terpeliharanya pendukung gedung kantor	45	jenis	45	jenis	100%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	100	%	100	%	100%	Kasi. Tata Pemerintahan
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Bontang Barat)	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100%	Kasi. Tata Pemerintahan



2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%	Kasi. Tata Pemerintahan
3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Bontang Barat	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	Kasi. Tata Pemerintahan
4	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	Terlaksananya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan Bontang Barat	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	Kasi. Tata Pemerintahan
5	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bontang Barat)	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Bontang Barat	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%	Kasi. Tata Pemerintahan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100	%	100	%	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	25	orang	25	orang	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3	kegiatan	3	kegiatan	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan



3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	9	Kegiatan	9	Kegiatan	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	Terlaksananya jasa kesehatan bagi penyuluh/ pembina kesehatan	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	Terlaksananya jasa kesehatan bagi penyuluh/ pembina kesehatan	6	Kegiatan	6	Kegiatan	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	Terlaksananya jasa kesehatan bagi penyuluh/ pembina kesehatan	11	Kegiatan	11	Kegiatan	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
9	Evaluasi Kelurahan		1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kanaan
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	100	%	100	%	100%	



1	Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Bontang Barat)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100%	Kasi. Trantibum
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanaan)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100%	Kasi. Trantibum Kelurahan Kanaan
3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100%	Kasi. Trantibum Kelurahan Gunung Telihan
4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Belimbing)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100%	Kasi. Trantibum Kelurahan Belimbing
V	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	100	%	100	%	100%	



1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Bontang Barat)	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	Kasi. Trantibum
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Kanaan)	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	Kasi. Trantibum Kelurahan Kanaan
3	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Elai)	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	Kasi. Trantibum Kelurahan Gunung Elai



4	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Belimbing)	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	Kasi. Trantibum Kelurahan Belimbing
---	--	--	---	----------	---	----------	------	-------------------------------------

B. REALISASI ANGGARAN

Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Bontang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp 30.452.026.028,00** dan realisasi anggarannya sebesar **Rp. 28.881.271.392,00** dengan rincian dan realisasinya sebagai berikut

:

Tabel 19 Realisasi anggaran Tahun 2021

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rp 30,452,026,028.00	Rp 28,881,063,392.00
	Jumlah	Rp 30,452,026,028.00	Rp 28,881,063,392.00
	Sisa Lebih		Rp 1,570,962,636.00

Sisa lebih anggaran tahun 2021 sebagian besar didominasi oleh belanja pegawai belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa untuk belanja langsung.

1. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20 Realisasi anggaran per program dan kegiatan

PEMERINTAH KOTA BONTANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian (Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Pagu Anggaran	Realisasi	Prosentase	Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
7 01	KECAMATAN	30,452,026,028.00	28,881,271,392.00	94.84	1,570,754,636.00
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,744,663,458.00	15,461,364,282.00	92.34	1,283,299,176.00
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,429,988.00	2,201,135.00	90.58	228,853.00
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,214,994.00	1,100,000.00	90.54	114,994.00
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,214,994.00	1,101,135.00	90.63	113,859.00
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,339,140,836.00	9,692,890,546.00	93.75	646,250,290.00
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,337,874,840.00	9,691,871,684.00	93.75	646,003,156.00
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	920,997.00	706,362.00	76.70	214,635.00
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	344,999.00	312,500.00	90.58	32,499.00
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	309,569,982.00	295,128,782.00	95.34	14,441,200.00
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	279,569,982.00	277,128,782.00	99.13	2,441,200.00
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000.00	18,000,000.00	60.00	12,000,000.00
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	873,438,970.00	831,317,083.00	95.18	42,121,887.00
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,946,132.00	17,319,217.00	96.51	626,915.00
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443,435,828.00	430,083,329.00	96.99	13,352,499.00
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,428,211.00	83,280,517.00	92.10	7,147,694.00
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,419,799.00	31,228,249.00	83.45	6,191,550.00
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,473,000.00	5,040,000.00	92.09	433,000.00
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278,736,000.00	264,365,771.00	94.84	14,370,229.00
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292,085,459.00	235,414,000.00	80.60	56,671,459.00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201,988,182.00	152,970,000.00	75.73	49,018,182.00
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	90,097,277.00	82,444,000.00	91.51	7,653,277.00
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,071,265,465.00	3,578,638,035.00	87.90	492,627,430.00
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165,300,000.00	148,233,024.00	89.68	17,066,976.00
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,905,965,465.00	3,430,405,011.00	87.82	475,560,454.00
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	856,732,758.00	825,774,701.00	96.39	30,958,057.00
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145,384,600.00	141,418,900.00	97.27	3,965,700.00
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,600,000.00	6,133,723.00	80.71	1,466,277.00
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	670,598,158.00	647,518,038.00	96.56	23,080,120.00
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,150,000.00	30,704,040.00	92.62	2,445,960.00
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	415,910,366.00	372,841,407.00	89.64	43,068,959.00
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152,978,348.00	149,026,578.00	97.42	3,951,770.00
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	118,289,253.00	117,223,578.00	99.10	1,065,675.00
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34,689,095.00	31,803,000.00	91.68	2,886,095.00
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	262,932,018.00	223,814,829.00	85.12	39,117,189.00

7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25,630,135.00	14,165,749.00	55.27	11,464,386.00
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	195,499,710.00	174,371,580.00	89.19	21,128,130.00
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41,802,173.00	35,277,500.00	84.39	6,524,673.00
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106,719,119.00	105,626,116.00	98.98	1,093,003.00
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99,795,484.00	98,702,481.00	98.90	1,093,003.00
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,795,484.00	98,702,481.00	98.90	1,093,003.00
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6,923,635.00	6,923,635.00	100.00	-
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	6,923,635.00	6,923,635.00	100.00	-
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	172,663,470.00	171,222,927.00	99.17	1,440,543.00
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	172,663,470.00	171,222,927.00	99.17	1,440,543.00
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	172,663,470.00	171,222,927.00	99.17	1,440,543.00
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12,771,199.00	12,771,199.00	100.00	-
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12,771,199.00	12,771,199.00	100.00	-
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12,771,199.00	12,771,199.00	100.00	-
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	457,401,184.00	439,871,316.00	96.17	17,529,868.00
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	457,401,184.00	439,871,316.00	96.17	17,529,868.00
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanaan)	457,401,184.00	439,871,316.00	96.17	17,529,868.00
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,316,279,544.00	1,277,392,100.00	97.05	38,887,444.00
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,316,279,544.00	1,277,392,100.00	97.05	38,887,444.00
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kanaan)	3,124,998.00	2,600,000.00	83.20	524,998.00
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanaan)	893,288,846.00	866,053,767.00	96.95	27,235,079.00
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanaan)	419,865,700.00	408,738,333.00	97.35	11,127,367.00
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	154,740,209.00	141,378,160.00	91.36	13,362,049.00
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	154,740,209.00	141,378,160.00	91.36	13,362,049.00
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kanaan)	154,740,209.00	141,378,160.00	91.36	13,362,049.00
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	687,976,897.00	669,708,076.00	97.34	18,268,821.00
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	687,976,897.00	669,708,076.00	97.34	18,268,821.00
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gn. Telihan)	687,976,897.00	669,708,076.00	97.34	18,268,821.00
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,715,269,432.00	2,693,203,778.00	99.19	22,065,654.00
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,715,269,432.00	2,693,203,778.00	99.19	22,065,654.00
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Gn. Telihan)	17,402,150.00	15,236,964.00	87.56	2,165,186.00
7 01 03 2.02 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gn. Telihan)	1,905,610,780.00	1,892,398,313.00	99.31	13,212,467.00
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gn. Telihan)	792,256,502.00	785,568,501.00	99.16	6,688,001.00
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160,265,302.00	120,790,600.00	75.37	39,474,702.00
7 01 04 2.01 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160,265,302.00	120,790,600.00	75.37	39,474,702.00
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Gn. Telihan)	160,265,302.00	120,790,600.00	75.37	39,474,702.00
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	702,782,925.00	678,639,844.00	96.56	24,143,081.00
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	702,782,925.00	678,639,844.00	96.56	24,143,081.00
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Belimbing)	702,782,925.00	678,639,844.00	96.56	24,143,081.00
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,305,645,138.00	6,257,974,428.00	99.24	47,670,710.00
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6,305,645,138.00	6,257,974,428.00	99.24	47,670,710.00
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Belimbing)	13,930,750.00	13,134,020.00	94.28	796,730.00

7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belimbing)	4,810,890,973.00	4,780,068,208.00	99.36	30,822,765.00
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Belimbing)	1,480,823,415.00	1,464,772,200.00	98.92	16,051,215.00
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	358,937,785.00	350,017,159.00	97.51	8,920,626.00
01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	358,937,785.00	350,017,159.00	97.51	8,920,626.00
01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Belimbing)	358,937,785.00	350,017,159.00	97.51	8,920,626.00
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	140,000,000.00	128,470,000.00	91.76	11,530,000.00
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	140,000,000.00	128,470,000.00	91.76	11,530,000.00
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Belimbing)	140,000,000.00	128,470,000.00	91.76	11,530,000.00
	Jumlah	30,452,026,028.00	28,881,271,392.00	94.84	1,570,754,636.00

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bontang Barat periode Januari s.d Desember 2021 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian pelaporan LKjIP ini merupakan sarana bagi Kecamatan Bontang Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bontang Barat secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilaksanakan. Peningkatan kinerja di Kecamatan Bontang Barat tetap harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Capaian Realisasi Fisik Kegiatan Kecamatan Bontang Barat pada Tahun 2021 sebesar **94,84%**. Secara umum Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah melaksanakan kegiatan rutin maupun pembangunan dengan **Capaian Realisasi Anggaran** sebesar Rp. **28.881.271.392,00** (*dua puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*) atau sebesar **94,84%** dari total **Pagu Anggaran** sebesar Rp. **30.452.026.028,00** (*tiga puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah*).

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target Kecamatan Bontang Barat ke depan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahan sebagai berikut:

- 1 Agar visi dan misi serta program - program yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, maka Kecamatan Bontang Barat akan lebih meningkatkan ketelitian dalam perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kesatuan yang terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan;

- 2 Agar kinerja personil pengelola kegiatan dapat ditingkatkan maka disarankan bimbingan teknis baik dibidang keuangan maupun administrasi kegiatan dari Pemerintah Kota Bontang secara rutin
- 3 Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kota perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bontang Barat